

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN**

**PUBLIK**

(Studi di Dinas Kepegawaian Pemuda Dan Olahraga Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Administrasi Publik



**OLEH :**

**MELKIANUS RUDI ARYANTO SERAN**

**2015210051**

**KOPENTENSI PELAYANAN MANAJEMEN PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2022**

## **RINGKASAN**

Berdasarkan persepsi yang saya pelajari secara lugas dan perspektif lingkungan sekitar di Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Malang, ada beberapa kendala yang dialami pada segmen bantuan. Kantor administrasi merupakan salah satu sudut pandang yang mempengaruhi sifat pemberian administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pelaksanaan e-government dalam pengembangan lebih lanjut administrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang dan untuk memutuskan jalannya pelaksanaan e-government dalam pengerjaan administrasi terbuka pada Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang. Pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi subyektif yang memukau, instrumen pemeriksaannya adalah ilmuwan itu sendiri. Prosedur pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan dua saksi, persepsi mulai 22 Februari 2022 - 22 Maret 2022 dan dokumentasi sebagai catatan lapangan dengan foto-foto yang disambung. Sedangkan pengujian informasi yang digunakan adalah model penyelidikan informasi intuitif yang terdiri dari pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Departemen Pemuda dan Olahraga telah menjalankan kerangka bantuan menggunakan kerangka kerja berbasis web yang selama periode Coronavirus dianggap sebagai salah satu layanan yang paling mengejutkan dengan menawarkan jenis bantuan menggunakan kerangka kerja elektronik, kemudian juga menggunakan jaringan terputus. Namun dengan syarat atau ketentuan yang berlaku saat ini imunisasi lengkap bagian satu dan dua mengingat sejauh pemberian bantuan yang diberikan berupa pemberian alat yang berfungsi WFH dan sebagian berada di tempat kerja serta variabel penghambat dan unsur pendukung yang terdapat pada permainan anak muda dan dinas pariwisata merupakan komponen penghambat dengan asumsi bahwa siklus pendampingan memanfaatkan pengaturan yang jelas di web, tolok ukurnya adalah masalah jaringan dan desain surat menyurat yang kurang berhasil, sedangkan variabel pendukungnya adalah dukungan dari pihak pengelola, daerah dan pejabat perorangan.

**Kata Kunci: Implementasi, E-Government, Pelayanan Publik**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan inovasi data telah memperoleh perubahan contoh penalaran individu dan kesan pelaksanaan organisasi publik dan wajib pajak. Dorongan dalam inovasi data sebagai ciri globalisasi tidak dapat dibedakan dari budaya masa kini seperti saat ini yang telah menyambut baik permintaan luar biasa daerah pada otoritas publik sebagai organisasi spesialis untuk lebih terbuka, lebih kuat dan produktif dalam melakukan kewajiban administrasinya. , karenanya mengangkat otoritas publik untuk melaksanakan gagasan administrasi yang baik. administrasi besar yang biasanya dikenal sebagai administrasi besar. Dibandingkan dengan pengakuan administrasi publik yang baik, otoritas publik diharapkan dapat menyesuaikan dengan pergantian mekanis peristiwa agar tidak ditinggalkan.

Salah satu fleksibilitas data adalah bagian dari bantuan publik. Saat ini Kota Malang membutuhkan pengelompokan pengurus yang lebih tinggi dalam mengembangkan pemerintahan lebih lanjut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan kemajuan inovasi internet.

Orang-orang pada umumnya dapat langsung terlibat dengan cara paling umum untuk mengatur, menjalankan dan mengamati strategi publik dengan semua kantor administrasi yang sudah memiliki kumpulan data yang sama. E-Government adalah

pemanfaatan inovasi komunikasi data dan media bagi organisasi pemerintah yang dianggap biasa untuk menawarkan jenis bantuan yang produktif dan berhasil serta memberikan keterusterangan dan pemenuhan kepada masyarakat. Selain itu, membuka pintu terbuka yang lebih luas bagi masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam membicarakan, mencela, dan memeriksa pilihan pemerintah dan kegiatan implementasi kebijakan.

E-Government dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan. Tingkat utama adalah otoritas publik untuk mendistribusikan data melalui situs. Tingkat selanjutnya adalah komunikasi antara daerah dan tempat kerja pemerintah melalui email. Tingkat ketiga adalah bahwa area lokal klien dapat mengelola pertukaran dengan tempat kerja pemerintah dengan premis yang saling melengkapi. Tingkat terakhir adalah campuran di seluruh tempat kerja pemerintah, di mana orang pada umumnya dapat melakukan pertukaran.

E-Government adalah pemanfaatan dan penggunaan inovasi data oleh otoritas publik untuk membuat korespondensi antara otoritas publik, area lokal, dunia bisnis, dan individu terkait lainnya untuk menawarkan jenis bantuan secara cepat dan tepat. Selain itu, E-Government hanya dicirikan sebagai pemanfaatan inovasi data oleh otoritas publik dalam berbagi data dan administrasi kepada kerabatnya, serta digunakan untuk bisnis dan masalah lain yang diingat untuk bisnis pemerintah (Subekti et al, 2017).

Isu-isu yang dilihat dari studi atau persepsi terkait dengan tidak adanya administrasi bahwa orang miskin telah diperluas ke daerah setempat. Seperti tidak adanya penundaan waktu dalam pemesanan tiket.

Jika E-Government dilakukan dengan sungguh-sungguh dan andal, maka akan sangat mendukung kelancaran administrasi publik di kemudian hari, tentunya akan lebih membantu perbaikan dan penanganan keluhan yang dipandang sebagai informasi dan dijawab serta dilingkari kembali ke pembaruan yang sebenarnya sesuai lokal. asumsi daerah.

Berdasarkan persepsi yang saya pelajari secara lugas dan perspektif lingkungan sekitar di Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Malang, ada beberapa kendala yang dialami pada segmen bantuan. Kantor administrasi merupakan salah satu sudut yang mempengaruhi sifat pemberian administrasi. Oleh karena itu, kepuasan aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu perspektif yang perlu diperhatikan dan para ahli juga perlu mengetahui pelaksanaan E-Government di lembaga pemerintahan khususnya di kota Malang dengan inovasi data yang menjanjikan kinerja yang lebih baik, karena itu adalah aturan mayoritas, non-menindas, waktu yang sesuai, terukur memiliki pedoman yang jelas.

Dari gambaran di atas, cenderung beralasan bahwa kehadiran E-Government membuat lebih mudah untuk sampai ke administrasi publik di tingkat kota dan metropolitan lokal, namun untuk situasi ini menyulitkan HR untuk jaringan yang tertindas sehingga para ilmuwan tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan E-

Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Pelayanan Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang. Penjelasan saya mengambil judul ini karena pelaksanaan pembenahan administrasi belum berjalan se-ideal waktu yang ditentukan.

## **1.2. Rumusan masalah**

Dari penggambaran dasar masalah, eksplorasi ini menemukan masalah pemeriksaan yang menyertainya:

- a. Bagaimana tingkat pelaksanaan e-government dalam menggarap administrasi terbuka di Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang?
- b. Apa saja variabel penekan dan variabel pendukung pelaksanaan E-government dalam menggarap administrasi terbuka di Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Poin-poin ilmuwan ini adalah:

1. Mengetahui keadaan pelaksanaan e-government dalam pengembangan lebih lanjut administrasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang.
2. Mengetahui cara paling umum dalam pelaksanaan e-government dalam mengerjakan administrasi terbuka di Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat Hipotesis

1. Dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan informasi serta referensi untuk eksplorasi di masa yang akan datang.
2. Efek samping dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemeriksaan regulasi.

### 1.4.2. Keuntungan yang layak

1. Sebagai alat penilaian bagi daerah dalam mensurvei keadaan pelaksanaan E-government dalam pengembangan lebih lanjut administrasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang.
2. Dapat mengetahui pelaksanaan E-government dalam pengembangan lebih lanjut administrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Pemuda dan Olahraga Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Deddy.Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi Dan EGovernance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harbani, Pasolong.2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Indrajit, R.Eko., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*.

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.